

# Karakteristik Dewan Dan *Cybersecurity Disclosure* (CSD) Pada Perusahaan Perbankan Indonesia

Nurul Amalina<sup>1</sup>

Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Correspondences : [nurulamalinadlt16@gmail.com](mailto:nurulamalinadlt16@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dewan terhadap *Cybersecurity Disclosure* (CSD), diantaranya jumlah dewan direksi, rapat dewan direksi, keberagaman gender dewan direksi, jumlah dewan komisaris, keberagaman gender dewan komisaris. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* digunakan sebagai variabel kontrol. Objek penelitian mencakup perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024 dengan pendekatan *total sampling*, sehingga diperoleh 235 sampel. Analisis data menerapkan analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian memperlihatkan jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan keberagaman gender dewan komisaris berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure* (CSD). Sementara itu, rapat dewan direksi dan keberagaman gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure* (CSD). Temuan ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan dewan yang lebih besar, serta keberadaan direktur perempuan yang lebih banyak di dewan komisaris mendorong transparansi keamanan siber.

**Kata Kunci:** Jumlah Dewan Direksi; Rapat Dewan Direksi; Keberagaman Gender Dewan Direksi; Jumlah Dewan Komisaris; Keberagaman Gender Dewan Komisaris

## *Board Characteristics and Cybersecurity Disclosure In The Indonesian Banking Industry*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of board characteristics on Cybersecurity Disclosure (CSD), including the number of board members, board meetings, gender diversity of the board of directors, the number of commissioners, gender diversity of the board of commissioners. Profitability, company size, and leverage are used as control variables. The research subjects include banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2024 using a total sampling approach, resulting in 235 samples. Data analysis applied multiple linear regression analysis. The research findings show that the number of board members, the number of commissioners, and the gender diversity of commissioners have an effect on Cybersecurity Disclosure (CSD). Meanwhile, board of directors meetings and gender diversity on the board of directors do not affect Cybersecurity Disclosure (CSD). These findings explain that companies with larger boards, as well as the presence of more female directors on the board of commissioners, encourage cybersecurity transparency.*

**Keywords:** Number of Board of Directors; Board of Directors Meetings; Gender Diversity of the Board of Directors; Number of Board of Commissioners; Gender Diversity of the Board of Commissioners

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 10  
Denpasar, Oktober 2025  
Hal. 2063-2077

**DOI:**  
10.24843/EJA.2025.v35.i10.p03

**PENGUTIPAN:**  
Amalina, N., & Sari, V. F.  
(2025). Karakteristik Dewan  
Dan Cybersecurity Disclosure  
(CSD) Pada Perusahaan  
Perbankan Indonesia.  
*E-Jurnal Akuntansi*,  
35(10), 2063-2077

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
10 Agustus 2025  
Artikel Diterima:  
17 Oktober 2025

## PENDAHULUAN

*Cybersecurity* adalah praktik untuk melindungi sistem computer dari adanya akses ilegal, yang kini menjadi tantangan tersendiri di era digitalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet semakin mendorong setiap orang untuk memanfaatkannya dengan bermacam-macam cara, namun juga membuka peluang terjadinya ancaman *cyber* dari berbagai entitas, mencakup negara maupun non-negara yang sulit diidentifikasi. Bagian kehidupan masyarakat modern sekarang tidak dapat dipisahkan dari internet.

Merujuk data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia menyentuh 79,50% atau sekitar 221 juta pengguna. Peningkatan ini turut mendorong sektor perbankan untuk melakukan digitalisasi layanan melalui pengembangan *Financial Technology (FinTech)*. *Financial Technology* atau *FinTech* adalah operasional bank dan lembaga keuangan lainnya didukung oleh teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Simatupang & Siska, 2021; Siska, 2022). Pembaruan teknologi finansial di sektor perbankan contohnya adalah *ATM*, *mobile banking*, *paperless loan procedures*, *digital currencies*, *blockchain*, *IoT*, *AI*, dll (Mazumder & Hossain, 2023). Namun, pesatnya integrasi teknologi keuangan juga diikuti adanya risiko baru, seperti ancaman keamanan siber yang perlu ditinjau secara luas (Umoga et al., 2024). Kemajuan dalam teknologi keuangan di sektor perbankan memiliki kekurangan dalam *cybersecurity*, yang dapat menyebabkan risiko seperti *cybercrime*.

*Cybercrime* mengacu pada segala tindak kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer serta internet (Widianingrum, 2024). *Cybercrime* semakin tersebar luas dan kompleks, mengancam ekonomi, keamanan, dan privasi individu. Salah satu *cybercrime* yang terjadi dalam sektor perbankan adalah pembobolan data nasabah. Insiden ini terjadi pada Bank Syariah Indonesia oleh organisasi *ransomware* yang mengatasnamakan sebagai *LockBit*. Organisasi ini mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mengakses data BSI, kebocoran informasi mencakup NDA, catatan keuangan, dokumen hukum, password perangkat internal dan eksternal, serta data pribadi lebih dari 15 juta nasabah dan pegawai (CNBC Indonesia, 2023), menunjukkan kerentanan sektor perbankan. Secara global, Laporan Clusit 2025 mencatat 3.541 kasus *cybercrime* dengan dampak kritis di 79% kasus, kenaikan permintaan tebusan mencapai rata-rata \$391.015 pada Q2 2024 mewakili gangguan skala besar yang dapat mengguncang stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik. Mengingat luasnya jangkauan serangan dan kemungkinan kerugian yang signifikan, pengungkapan mengenai insiden *cyber* yang dialami perusahaan, serta cara menangani ancaman tersebut menjadi suatu kepentingan bagi para pemangku kepentingan (Alodat et al., 2024).

Guna memitigasi risiko terjadinya kejahatan di sektor perbankan, perusahaan harus mengembangkan manajemen risiko yang menyeluruh dalam bidang *cybersecurity*, serta menyusun strategi untuk melindungi data pengguna. Dengan demikian, terdapat peningkatan tuntutan yang lebih besar mengenai transparansi perusahaan publik oleh pemangku kepentingan mengenai cara mereka mengidentifikasi, menilai dan menangani ancaman *cyber* (SecurityScorecard, 2021). Perancangan dan implementasi manajemen risiko pada konteks ini bersifat sistematis dan fokus pada *cybersecurity*. Perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi mengenai strategi *cybersecurity* dalam laporan tahunan. Rancangan ini tidak hanya menguatkan sistem pengendalian internal, tetapi juga memberikan dasar analitis kepada para pemangku kepentingan untuk menilai

keberlangsungan prospek bisnis di masa depan, terutama dalam mengantisipasi potensi ancaman dan dampak risiko *cybersecurity* terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.

Pengungkapan manajemen risiko perusahaan terkait *cybersecurity* diungkapkan melalui Pengungkapan Keamanan Siber atau *Cybersecurity Disclosure* (CSD). Pengungkapan keamanan siber merupakan agenda pengungkapan baru dan penting dalam perusahaan (Alodat et al., 2024). Di Indonesia, *Cybersecurity Disclosure* (CSD) masih bersifat sukarela dan belum menjadi kewajiban yang harus dilaporkan perusahaan. Sedangkan pengungkapan sukarela menurut teori keagenan berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk mengurangi potensi terjadinya asimetri informasi sekaligus menekan biaya keagenan (Fitriana et al., 2014). Oleh karena itu, pelaporan CSD secara sukarela menjadi salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko siber. Isu mengenai CSD sendiri semakin mendapat perhatian dari para akademisi (Ain et al., 2023). Akan tetapi, sebagian besar penelitian terbaru mengenai CSD baru dilakukan di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada (misalnya Alodat et al., 2024; Gao et al., 2020; Radu & Smaili, 2022). Di negara berkembang, penelitian mengenai CSD di sektor perbankan baru dilakukan di negara Iraq dan Bangladesh (misalnya Al-Yasari & Saada, 2024; Mazumder & Hossain, 2023). Meskipun belum diatur secara implisit oleh OJK, praktik ini selaras dengan POJK No. 11/PJOK.03/2022 yang mendorong katahanean dan ketentuan teknologi informasi di perbankan. Pengungkapan ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola risiko dan transformasi dengan pemangku kepetingan.

Oleh sebab itu, *cybersecurity* pada sektor perbankan tidak terlepas dari aplikasi tata kelola yang baik, karena tata kelola memiliki peran yang penting untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dan meningkatkan kesejahteraan serta keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian (Khoiriyah et al., 2020; Kholmi et al., 2021) membuktikan bahwa adanya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian sebelumnya terbatas pada penelitian mengenai pengungkapan sukarela terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (Alkayed & Omar, 2023), *Sustainability Reporting* (Correa-Garcia et al., 2020), dan kinerja ESG (Zachary & Fuad, 2025). Namun, masih terbatas yang membahas tentang *Cybersecurity Disclosure* (CSD).

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran terkait faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela, satu diantaranya ialah *Good Corporate Governance*. Satu diantara skema tata kelola perusahaan yang berpengaruh ialah anggota dewan (Sirait et al., 2024). Dewan perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan pengungkapan sukarela. Dewan bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan *cybersecurity* yang tepat dalam organisasi untuk memerangi ancaman *cyber* dan memastikan pengungkapan (Radu & Smaili, 2022). Di Indonesia, struktur perusahaan menggunakan *two-tier system*, yang terdiri atas dewan pengawas dan dewan eksekutif. Model ini berbeda sejumlah negara lain yang menerapkan sistem satu tingkat. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris, sementara fungsi eksekutif berada di tangan dewan direksi (Alexander, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana karakteristik dewan direksi (meliputi jumlah dewan, rapat dewan, dan keberagaman gender) dan karakteristik dewan komisaris (meliputi jumlah dewan dan keberagaman gender) memengaruhi *Cybersecurity Disclosure* (CSD) sektor perbankan di Indonesia.

Dalam struktur perusahaan, direksi berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan, yang kewenangan serta tanggung jawab dalam menjalankan operasional bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham dan mewakili perusahaan di ranah hukum (Zarkasyi, 2018). Keberadaan dewan direksi yang lebih besar memberi keuntungan bagi pemangku kepentingan karena semakin jelas pembagian tanggung jawab individu (Pramudityo & Sofie, 2023). Semakin besar jumlah dewan direksi dipercaya dapat meningkatkan pemahaman atas risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga mendorong pengungkapan risiko secara lebih luas (Mohamad et al., 2024).

Rapat dewan direksi adalah sarana yang dipersiapkan untuk membahas berbagai isu dan masalah utama di antara anggota dewan, dengan tujuan untuk menetapkan keputusan strategis guna mendorong perkembangan dan kemajuan organisasi (Felix et al., 2018). Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dewan direksi wajib mengadakan rapat minimal sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan dewan komisaris setiap empat bulan ((Umbing et al., 2022) Frekuensi pertemuan dewan direksi menunjukkan konsistensinya dalam mengevaluasi pembahasan isu *cybersecurity disclosure* (Alodat et al., 2024).

Keberagaman dewan mengacu pada eksistensi individu dengan beragam gender dewan direksi suatu perusahaan. Konsep tersebut sering dibahas berkaitan dengan *corporate governance* dan keberhasilan perusahaan, dengan fokus spesifik pada kenaikan jumlah perempuan menjadi pemimpin (Rahmat, 2024). Semakin besar keberadaan perempuan di tingkat direktur dianggap bermanfaat untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan pengaruh eksternal, seperti tuntutan pengungkapan sukarela (Farida, 2019).

Dewan komisaris berperan penting dalam penentuan strategi, pengawasan operasional serta memastikan manajemen berkontribusi untuk meningkatkan performa sesuai tujuan perusahaan (Ambarsari & Pratomo, 2019). Semakin banyak anggota dewan, semakin besar pengaruh pengungkapan sukarela terhadap transparansi, karena dewan yang mengawasi dengan baik cenderung meyakinkan bahwasanya manajemen berbuat sesuai dengan kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingannya (Setiawan & Ridaryanto, 2022).

Keberagaman gender dalam dewan komisaris merujuk pada keterlibatan perempuan sebagai anggota dewan. Hal ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk regulator, investor, perusahaan, akademisi dan publik, karena peran perempuan dalam perusahaan terus mengalami peningkatan secara bertahap (Orazalin, 2020). Tingginya proporsi wanita dalam komisaris dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Semakin banyak perempuan yang berada di dewan dapat meningkatkan transparansi terkait *cybersecurity* dan pengelolaan perusahaan (Radu & Smaili, 2022).

Penelitian ini menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan untuk menentukan apakah variabel ini perlu dinetralkan, dihapus, atau tetap dipertahankan (Irmalasari et al., 2022). Penggunaan variabel kontrol ini telah digunakan oleh peneliti lain (misalnya Radu & Smaili, 2022; Alodat et al., 2024; Mazumder & Hossain, 2023). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Kasmir, 2019). Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya



suatu perusahaan (Purnama & Handayani, 2021). Leverage merupakan tingkat penggunaan dana perusahaan untuk membiayai aktivitas usahanya, baik yang bersumber dari pinjaman maupun dari modal sendiri (Kasmir, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi di Inggris oleh Alodat et al., (2024), yang sebelumnya menyoroti pengaruh komposisi dewan terhadap pengungkapan keamanan siber. Penelitian ini diperbarui dengan fokus pada Indonesia, bermaksud untuk menginvestigasi hubungan tata kelola perusahaan dan CSD. Selain itu, penelitian ini menyertakan variabel yang berkaitan dengan dewan komisaris untuk disesuaikan dengan sistem tata kelola perusahaan *two tier* di Indonesia, sebagaimana tertera di UU No. 40 tahun 2007. Sistem ini dengan jelas membedakan antara peran dewan komisaris dan dewan direksi, bertanggung-jawab spesifik dalam menjamin praktik pengungkapan keamanan siber yang tepat.

Untuk memperbesar pemahaman dewan direksi mengenai kemungkinan risiko suatu perusahaan, jumlah anggota dewan direksi perlu ditambahkan, yang dapat mendorong pengungkapan risiko. Secara umum, semakin besar perusahaan harus memiliki dewan yang lebih besar karena aktivitas yang beragam, sehingga memerlukan lebih banyak anggota. Menurut teori agensi, semakin banyak dewan berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan yang lebih baik terhadap tindakan manajerial, yang dapat memberikan dampak positif pada pengungkapan perusahaan (Elzahar & Hussainey, 2012). Menurut Saleh et al., (2020), semakin besar jumlah dewan akan memiliki keterampilan, ide, dan pengalaman yang beragam daripada yang kecil. Penelitian sebelumnya oleh (Alodat et al., 2024; Al-Yasari & Saada, 2024) juga memberikan bukti empiris bahwa semakin besar total dewan direksi, semakin tinggi *Cybersecurity Disclosure* (CSD). Jadi, diduga semakin besar dewan direksi perusahaan akan mempengaruhi tingkat CSD yang lebih tinggi

H<sub>1</sub> : Jumlah Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

Pandangan teori keagenan, frekuensi pertemuan dewan sering dijadikan tolak ukur tingkat kegiatan dan ketekunan dewan dalam menjalankan tugasnya. Frekuensi rapat dewan memungkinkan direksi untuk membahas strategi dengan lebih mendalam, mendapatkan informasi penting secara tepat waktu, dan memberikan respons terhadap isu-isu penting, seperti tuntutan pemangku kepentingan dan pengungkapan perusahaan, dengan adanya rapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akuntabel (Alodat et al., 2023). Penelitian Alodat et al., (2024) menyajikan bukti empiris bahwasanya total rapat dewan direksi berpengaruh positif atas *Cybersecurity Disclosure* (CSD). Oleh karena itu, diduga semakin tinggi jumlah rapat dewan direksi yang dilaksanakan secara rutin akan mempengaruhi tingkat CSD yang lebih tinggi.

H<sub>2</sub> : Rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

Teori agensi mendukung pentingnya keberagaman gender dalam struktur organisasi dan dapat menyebabkan lebih sedikit konflik agensi melalui peningkatan pengendalian manajemen (Rahmat, 2024). Menurut Aribi et al., (2018), semakin banyak anggota dewan direksi perempuan mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan lingkungan informasi dan transparansi bisnis. Selain itu, telah dibuktikan bahwa CSD yang bersifat sukarela dikaitkan dengan persentase direktur perempuan yang lebih besar di dewan direksi. Akibatnya, kehadiran anggota dewan direksi perempuan seharusnya dapat mengurangi risiko *cybersecurity* (Al-Yasari & Saada, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Mazumder & Hossain, 2023; Radu & Smaili, 2022; Sari et al., 2024) memberikan bukti empiris bahwasanya keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif atas *Cybersecurity Disclosure*. Oleh

karena itu, diduga adanya heterogenitas gender dewan direksi akan mempengaruhi tingkat CSD yang lebih tinggi.

H<sub>3</sub> : Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

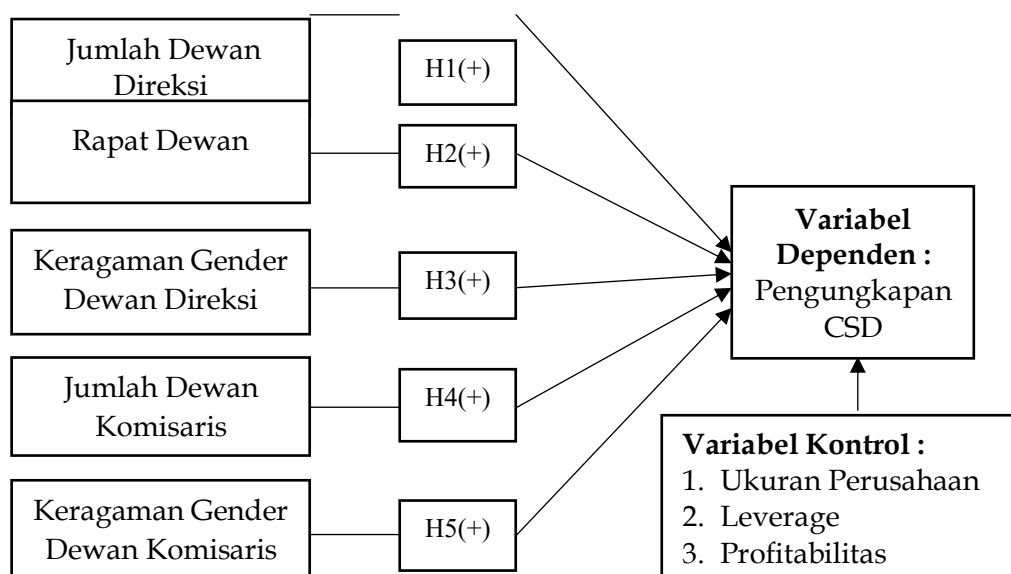
Sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, dewan komisaris berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemantauan dapat mengurangi masalah keagenan yang berperan dalam mengoptimalkan keberhasilan perusahaan (Jensen et al., 1976). Penurunan *agency cost* serta konflik keagenan, ditambah dengan kemampuan komisaris untuk terlepas dari kepentingan pribadi dan menghindari konflik kepentingan, adalah faktor yang menunjukkan kemampuan dari dewan komisaris untuk mengatasi masalah tersebut (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Untuk itu, dewan komisaris diharapkan memainkan peran esensial dalam meningkatkan CSD. Penelitian (Dipasti & Sulistyowati, 2022; Rudyanto dan Siregar, 2018; Zachary & Fuad, 2025) memperlihatkan ukuran dewan komisaris berefek positif atas pengungkapan sukarela. Jadi, diduga semakin besar total dewan komisaris akan mempengaruhi CSD sukarela yang lebih tinggi.

H<sub>4</sub> : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

Dari pandangan teori agensi, komisaris wanita meningkatkan efektivitas pemantauan dewan perusahaan (Orazalin, 2020). Peranan wanita dalam dewan dapat memperbaiki transparansi tentang *cybersecurity* dengan berbagai cara, seperti pengetahuan umum dan spesifik, independensi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, kesadaran etis, pengawasan terhadap risiko, gaya kepemimpinan, dan sifat lainnya (Alodat et al., 2024). Semakin banyak perempuan yang berada di dewan dapat meningkatkan transparansi terkait *cybersecurity* dan pengelolaan perusahaan (Radu & Smaili, 2022). Penelitian Kurnia et al., (2024) membuktikan keberagaman gender dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

H<sub>5</sub> : Keberagaman gender dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Cybersecurity Disclosure*.

#### Variabel Independen :



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data sekunder ditemukan secara tidak langsung melalui pihak lain, seperti buku, literatur, dokumen, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder ditemukan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk tahun 2020 hingga 2024. Laporan-laporan tersebut diakses dari laman resmi perusahaan dan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data ialah dokumentasi, meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang terkandung dalam laporan-laporan perusahaan tersebut. Metode pengambilan sampel yang diterapkan studi ini ialah *total sampling*. *Total sampling* merujuk pada metode pemilihan sampel di mana ukuran sampel sebanding dengan total populasi (Abdullah et al., 2024). Sampel studi ini meliputi 47 perusahaan di sektor perbankan di Indonesia yang terdata di BEI antara tahun 2020 hingga 2024. Total sampel yang dipergunakan adalah 235.

*Cybersecurity Disclosure* (CSD) disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Pengukuran CSD menggunakan total jumlah kata dengan mengidentifikasi pengungkapan *cybersecurity*, mengandalkan kata kunci terkait CSD, seperti "*cyber*", "*cybersecurity*", "*cyberattack*", dan "*information security*", konsisten dengan penelitian terdahulu (Radu & Smaili, 2022).

Dewan direksi merupakan pemimpin yang bertanggung jawab secara aktif untuk memastikan bahwa manajemen dan pihak lain dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tujuan perusahaan. Jumlah dewan direksi mempresentasikan nilai dewan direksi yang dikalkulasikan dengan menghitung total anggota dewan direksi yang menjabat (Alodat et al., 2024).

$$\text{Jumlah Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi} \dots\dots\dots(1)$$

Rapat dewan direksi merupakan sebuah ruang untuk pengambilan keputusan strategis dan evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh jajaran direksi. Pengukuran rapat dewan direksi dilihat dari total rapat dewan direksi selama satu tahun (Alodat et al., 2024).

$$\text{Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Direksi} \dots\dots\dots(2)$$

Keberagaman gender dewan direksi ialah kondisi ketika anggota dewan direksi terdiri dari lebih dari satu jenis kelamin, mencerminkan variasi latar belakang dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Keberagaman gender dewan direksi ditentukan dengan persentase anggota dewan direksi perempuan (Alodat et al., 2024).

$$KGDD = \frac{\text{Jumlah Dewan Direksi Perempuan}}{\text{Jumlah Total Dewan Direksi}} \dots\dots\dots(3)$$

Dewan komisaris bertugas mengawasi kinerja direksi dan menjamin perusahaan dikelola sesuai prinsip *good corporate governance*. Jumlah dewan komisaris ditentukan dengan total anggota dewan komisaris (Alodat et al., 2024).

$$\text{Jumlah Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris} \dots\dots\dots(4)$$

Keberagaman gender dewan komisaris menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dan pengalaman dalam proses pengawasan manajemen. Keberagaman gender dewan komisaris ditentukan dengan persentase anggota dewan komisaris perempuan (Alodat et al., 2024).

$$KGDK = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Perempuan}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots(5)$$

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis menghasilkan nilai variabel terikat dengan memanfaatkan nilai dari variabel bebas (Ghozali,

2018). Analisis ini melihat korelasi variabel bebas, terikat dan kontrol apakah berkorelasi positif atau berkorelasi negatif.

$$\text{CSD} = \beta_0 + \beta_1\text{JD} + \beta_2\text{RD} + \beta_3\text{GD} + \beta_4\text{JK} + \beta_5\text{GK} + \beta_6\text{PROF} + \beta_7\text{SIZE} + \beta_8\text{LEV} + \varepsilon \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

- CSD = Pengungkapan Keamanan Siber
- JD = Jumlah Dewan Direksi
- RD = Rapat Dewan Direksi
- GD = Keberagaman Gender Dewan Direksi
- JK = Jumlah Dewan Komisaris
- GK = Keberagaman Gender Dewan Komisaris
- PROF = Profitabilitas
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- LEV = *Leverage*
- $\beta_0$  = *Intercept*
- $\beta_0-8$  = Koefisien estimasi pada setiap variabel
- $\varepsilon$  = *Error*

Variabel kontrol meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage*. Profitabilitas ditentukan dengan *Return On Assets* (ROA). Rasio ini mengukur besarnya perusahaan dapat meraih profit secara keseluruhan. ROA ditentukan dengan membagi laba bersih dengan total aset (Radu & Smaili, 2022). Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi suatu perusahaan, dan biasanya diukur berdasarkan total aset. Ukuran perusahaan ditentukan dengan logaritma natural dari total aset (Radu & Smaili, 2022). *Leverage* ditentukan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER). Rasio ini memperlihatkan seberapa jauh perusahaan dibiayai utang dibanding dengan ekuitas. DER ditentukan dengan membanding total utang dengan total ekuitas (Radu & Smaili, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif ialah alat untuk menganalisis dan memberikan informasi atas data yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan mean, standar deviasi, skor minimal, dan skor maksimal sebagai alat analisis dari statistik deskriptif (Ghozali, 2018).

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
CSDwords	235	0.000	194.000	34.777	37.625
JD	235	3.000	17.000	6.644	2.743
RD	235	8.000	261.000	39.45	31.718
GD	235	0.000	1.000	0.180	0.177
JK	235	2.000	14.000	5.030	2.487
GK	235	0.000	0.677	0.156	0.173
PROF	235	-0.180	0.084	0.005	0.025
SIZE	235	13.488	30.994	20.481	4.568
LEV	235	0.080	16.078	4.557	2.943
Valid N (listwise)	235				

Sumber: Data Penelitian, 2025

Variabel "*Cybersecurity Disclosure*" (CSD) nilai min. 0 dan nilai max. 194. Rata-rata dari (CSD) untuk seluruh data adalah 34. 77 dengan std dev. sebesar 37. 625. Variabel "Jumlah Dewan Direksi" mencatat nilai min.sebesar 3 dan max. sebesar 17, dengan mean 6. 64 dan



deviation standart 2. 743. Variabel "Rapat Dewan" memperlihatkan nilai min. 8 dan nilai max. 261, dengan mean 39. 45 dan standar dev 31. 718. Variabel "Keberagaman Gender di Dewan Direksi" memiliki nilai min. 0. 00 dan nilai max. 1. 00, dengan mean 0. 180 dan standar dev 0. 1779. Variabel "Jumlah Dewan Komisaris" mencatat nilai min. 2 dan nilai max. 14, dengan mean 5. 03 dan standar dev 1. 487. Variabel "Keberagaman Gender di Dewan Komisaris" menunjukkan nilai min. 0. 0 dan nilai max. 0. 67, dengan mean 0. 156 serta standar dev 0. 1730.

Profitabilitas memiliki nilai min. -0. 180 dan nilai max. 0. 084, dengan mean 0. 005 dan standar deviasi 0. 025. Ukuran perusahaan memiliki nilai min.13. 488 dan nilai max. 30. 994, dengan mean 20. 481 dan standar deviasi 4. 568. *Leverage* menunjukkan nilai min. 0. 080 dan nilai max. 16. 078. Rata-ratanya adalah 4. 557 dan standar deviasinya 2. 943.

Tes normalitas mengindikasikan nilai sig. 0,200 > 0,05. Jadi, dikatakan data terdistribusi normal. Temuan tes multikolineritas memperlihatkan *tolerance* 1 di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, sehingga data terbebas dari multikolineritas. Temuan tes heteroskedastisitas dengan tes *Glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi tiap variabel melebihi 0,05. Selain itu, model regresi ini tidak terindikasi tanda-tanda heteroskedastisitas. Temuan tes autokorelasi memperlihatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.868. Menurut tabel DW, nilai DU adalah 1,847. Dengan demikian, nilai DW melebihi nilai DU dan di bawah 4-DU 1,847<1,868<2,153. Alhasil tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 2 Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	986.894	8	123.362	23.669	.000 <sup>b</sup>
Residual	1177.886	226	5.212		
Total	2164.780	234			

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil tes F mengindikasikan nilai sig. 0,000. Nilai tersebut dibawah 0,05 atau 0,000 < 0,05 artinya model regresi dinyatakan layak dipergunakan.

Nilai dari *adjusted R Square* senilai 0,437 atau 43,7%. Hasil tersebut berarti variasi variabel dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas dalam memengaruhi model persamaan regresi adalah 43,7%. Sementara sisanya 56,3% diakibatkan variabel lain selain variabel yang digunakan di studi ini.

**Tabel 3 Hasil Uji T (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	46.232	14.007		3.301	0.001
JD	1.963	0.597	0.330	3.291	0.001
RD	.159	0.661	0.014	.241	0.810
GD	1.094	0.620	0.093	1.765	0.079
JK	1.685	0.557	0.282	3.025	0.003
GK	1.647	0.574	0.149	2.872	0.004
PROF	-49.231	13.116	-0.197	-3.754	0.000
SIZE	0.050	0.323	0.008	0.156	0.876
LEV	0.002	0.425	0.000	0.005	0.996

a. Dependent Variable: CSD

Sumber: Data Penelitian, 2025

Variabel "Jumlah Anggota Dewan Direksi" koefisien regresinya 1. 963 dan nilai sig. 0. 001<0. 05. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Direksi mempengaruhi *Cybersecurity Disclosure*, sehingga H1 diterima. Variabel "Rapat Dewan Direksi" memiliki koefisien regresi 0.159 dan nilai sig. 0. 810>0.05. Maka, Rapat Dewan Direksi tidak berpengaruh atas *Cybersecurity Disclosure*, atau H2 ditolak. Variabel "Keberagaman Gender Dewan Direksi" koefisien regresinya 1. 094 dan nilai sig. 0. 079>0. 05. Jadi, Keragaman Gender Dewan Direksi tidak mempengaruhi *Cybersecurity Disclosure*, jadi H3 ditolak. Variabel "Jumlah Komisaris" koefisien regresinya 1. 685 dan nilai sig. 0. 003<0.05. Maka dari itu, jumlah Komisaris berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure*, sehingga H4 diterima. Variabel "Keberagaman Gender Dewan Komisaris" koefisien regresinya 1. 647 dan nilai sig. 0. 004<0. 05. Alhasil, "Keberagaman Gender Dewan Komisaris" mempengaruhi *Cybersecurity Disclosure* jadi H5 diterima. Variabel kontrol dimasukkan dalam setiap model regresi yang diuji. Variabel kontrol "Profitabilitas," "Ukuran Perusahaan," dan "Leverage" tidak mempengaruhi *Cybersecurity Disclosure*.

Jumlah anggota dewan direksi berefek positif signifikan atas *Cybersecurity Disclosure*. Temuan ini mendukung hipotesis pertama (H1). Hasil tersebut searah dengan studi (Alodat et al., 2024; Al-Yasari & Saada, 2024), yang mengemukakan bahwa jumlah anggota dewan direksi berefek positif atas pengungkapan informasi keamanan siber. Temuan ini memperlihatkan semakin banyak anggota dewan, semakin besar peluang perusahaan melakukan pengungkapan keamanan siber. Temuan studi ini selaras dengan prinsip teori keagenan, yang menindikasikan jumlah anggota dewan direksi yang lebih banyak dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengawasi kegiatan manajemen, sehingga mungkin meningkatkan tingkat transparansi informasi dalam organisasi (Elzahar & Hussainey, 2012). Selain untuk meningkatkan kinerja dewan direksi juga berusaha untuk meningkatkan manajemen yang efektif agar mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Partisipasi dewan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengungkapan informasi terkait keamanan siber mencerminkan pelaksanaan tugas mereka dalam manajemen perusahaan. Dengan demikian, ukuran dewan direksi menjadi elemen penting yang dapat mendorong peningkatan tingkat pengungkapan informasi mengenai keamanan siber, terutama dalam industri perbankan.

Variabel frekuensi pertemuan dewan direksi tidak berpengaruh pada *Cybersecurity Disclosure*. Temuan tersebut tidak mendukung hipotesis kedua (H2). Penemuan ini bertolak belakang dengan studi sebelumnya oleh (Alodat et al., 2024), yang mengindikasikan pertemuan dewan berefek positif signifikan atas pengungkapan keamanan siber. Hasil tersebut juga bertentangan dengan teori agensi, yang mengemukakan peningkatan frekuensi pertemuan memungkinkan para direktur untuk membahas isu-isu terkini, termasuk pengungkapan keamanan siber, dengan lebih mendalam. Frekuensi rapat dewan tidak mencerminkan ketekunan dewan direksi dalam mempertimbangkan dan mendiskusikan isu *Cybersecurity Disclosure*, yang mengurangi asimetri informasi dan memastikan lebih banyak transparansi. Banyaknya frekuensi rapat belum tentu berdampak pada *Cybersecurity Disclosure* menjadi lebih baik. Hal ini tergantung lebih pada kualitas rapat yang dilaksanakan daripada kuantitas rapat tersebut. Artinya, adanya kemungkinan kehadiran dewan direksi dalam rapat pembahasan mengenai topik *Cybersecurity Disclosure* belum menjadi agenda utama. Selain itu, tingkat kehadiran rapat anggota dewan direksi tidak mencapai 100%, sehingga antar anggota dewan direksi terjadi komunikasi yang tidak bagus.

Variabel keberagaman gender dewan direksi tidak berefek atas *Cybersecurity Disclosure*. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis ketiga (H3) dari studi ini. Temuan studi

ini berlainan dengan penemuan sebelumnya oleh (Mazumder & Hossain, 2023; Radu & Smaili, 2022; Sari et al., 2024) yang menunjukkan bukti empiris bahwa variasi gender di dalam dewan direksi berefek positif atas Pengungkapan Keamanan Siber. Hal ini bertentangan juga dengan teori agensi mendukung pentingnya keberagaman gender dalam struktur organisasi dapat meminimalkan konflik agensi dengan menaikkan pengawasan atas manajemen (Rahmat, 2024). Selain itu, hasil yang tidak signifikan dapat juga terjadi pada kecilnya persentase perempuan dalam dewan direksi dengan hasil regresi rata-rata 18%. Angka ini memperlihatkan kehadiran perempuan dalam dewan direksi masih tergolong kecil, sehingga dapat membatasi efektivitas mereka dan tidak memiliki mayoritas suara yang cukup dalam mempengaruhi *Cybersecurity Disclosure*. Penting ditekankan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan, tidak hanya kuantitas perempuan dalam dewan direksi yang berperan penting tetapi juga kualitas masing-masing individu yang terlibat (Aprilya & Kesaulya, 2023).

Variabel Jumlah dewan komisaris berefek positif signifikan atas *Cybersecurity Disclosure*. Temuan ini mendukung hipotesis keempat (H4). Hasil tersebut konsisten dengan studi sebelumnya oleh (Dipasti & Sulistyowati, 2022; Rudyanto dan Siregar, 2018; Zachary & Fuad, 2025), yang memperlihatkan jumlah anggota dewan komisaris berefek positif atas pengungkapan sukarela. Dengan kata lain, semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin besar perusahaan untuk membagikan informasi yang lebih mendalam dalam laporan tentang keamanan siber. Hasil studi ini selaras dengan prinsip teori keagenan, yang mengungkapkan pengawasan dapat meminimalkan masalah keagenan yang berperan dalam mengoptimalkan keberhasilan perusahaan (Jensen et al., 1976). Peningkatan jumlah dewan komisaris dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga mendorong adanya pengungkapan informasi yang lebih transparan. Temuan ini konsisten dengan pengawasan yang diemban dewan komisaris, yakni memberikan masukan strategis kepada direksi terkait perlunya *Cybersecurity Disclosure*. Semakin besar dewan komisaris juga memperkuat efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan direksi, sehingga memastikan kepatuhan terhadap kepentingan *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya.

Variabel keberagaman gender dewan komisaris berefek positif signifikan atas *Cybersecurity Disclosure*. Temuan ini mendukung hipotesis kelima (H5). Temuan studi ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Kurnia et al., (2024) membuktikan bahwa keberagaman gender dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure*. Menurut perspektif teori keagenan, keberadaan komisaris perempuan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dewan dalam suatu perusahaan (Orazalin, 2020). Keterlibatan perempuan dalam struktur dewan dinilai mampu mendorong peningkatan transparansi terkait isu *Cybersecurity* melalui berbagai kontribusi, seperti pengetahuan yang bersifat umum maupun spesifik, sikap independen, kepedulian terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kesadaran etis, kemampuan dalam mengawasi risiko, serta gaya kepemimpinan dan sifat lainnya (Alodat et al., 2024) Semakin tinggi representasi perempuan dalam dewan, maka semakin besar pula perhatian dewan terhadap *Cybersecurity Disclosure* dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan (Radu & Smaili, 2022).

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profit tinggi cenderung tidak melakukan *Cybersecurity Disclosure*. Tidak adanya dampak profitabilitas terhadap CSD disebabkan kenyataan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih kuat cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dengan demikian, pengungkapan sukarela

dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan investor dan kreditur (Neliana, 2018). Ketika profitabilitas perusahaan tinggi, pihak internal akan memikirkan manfaat serta konsekuensi dari informasi yang akan dibagikan. Pengungkapan informasi dapat menarik minat investor, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi pesaing untuk memahami strategi perusahaan yang bersangkutan (Subarno et al., 2022).

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure* sebab besarnya total aset yang dimiliki tidak serta-merta membuat perusahaan menyajikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kepentingan serupa dalam persaingan memperoleh tambahan pendanaan di pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan berskala kecil cenderung tetap menyampaikan informasi pengungkapan minimum agar dapat menyamai perusahaan besar dan meningkatkan daya saingnya (Subarno et al., 2022).

*Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Cybersecurity Disclosure*. Temuan ini menjelaskan bahwa baik perusahaan dengan rasio DER yang rendah maupun tinggi tidak selalu memberikan tingkat pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Dengan kata lain, besar kecilnya *leverage* tidak memengaruhi intensitas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya (Pernamasari 2020). Selain itu, informasi terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola utang terhadap ekuitas tidak menjadi faktor pendorong bagi manajemen untuk menyajikan informasi tambahan secara lebih luas (Dahiyat, 2020).

## SIMPULAN

Analisis tersebut menyimpulkan bahwa jumlah anggota direksi, jumlah dewan komisaris, dan keberagaman gender di dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan atas *Cybersecurity Disclosure* (CSD) di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2020-2024. Temuan ini menyoroti pentingnya karakteristik dewan dalam mengungkapkan informasi terkait manajemen risiko, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam memilih anggota dewan serta bagi pemerintah untuk menyusun regulasi terkait pengungkapan keamanan siber. Di sisi lain, frekuensi rapat direksi dan keberagaman gender di dewan direksi tidak ditemukan efek yang signifikan.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu hanya berfokus pada industri perbankan, hanya menggunakan lima variabel, dan memiliki durasi pengamatan yang relatif singkat (5 tahun). Untuk itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mengekspansi cakupan dengan menambahkan industri lain, memperpanjang periode pengamatan hingga lebih dari lima tahun, dan menambahkan variabel independen lain seperti karakteristik komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing.

## REFERENSI

- Ain, N. H., Fernando, K., Kurniawan, B., & Sambuaga, E. A. (2023). Role of Board Composition on Voluntary Cybersecurity Disclosure: Evidence of Banking Companies in Southeast Asia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), <https://doi.org/10.15408/akt.v16i2.35014>
- Alodat, A. Y., Al Amosh, H., Khatib, S. F. A., & Mansour, M. (2023). Audit committee chair effectiveness and firm performance: The mediating role of sustainability disclosure. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2181156>
- Alodat, A. Y., Hao, Y., Nobanee, H., Ali, H., Mansour, M., & Al Amosh, H. (2024). Board characteristics and cybersecurity disclosure: evidence from the UK. *Electronic Commerce Research*. <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09867-w>



- Al-Yasari, M. N. O., & Saada, M. Ben. (2024). The Impact of the Board of Directors on the Cybersecurity Risks in the Iraqi Banking Sector. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(1). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.1.00291>
- Aprilya, D. C., & Kesaulya, A. F. (2023). Pengaruh Board Diversity Terhadap Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 2(1).
- Aribi, Z. A., Alqatamin, R. M., & Arun, T. (2018). Gender diversity on boards and forward-looking information disclosure: evidence from Jordan. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(2), 205–222. <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2016-0039>
- Dahiyat, A. A. (2020). Determinants of Voluntary Disclosure Quality in Jordan: Evidence From Manufacturing Companies Listed in Amman Stock Exchange. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 24(5), 1–11.
- Dipasti, V. A., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap CSR Disclosure. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 394. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.544>
- Elzahar, H., & Hussainey, K. (2012). *Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports*.
- Fitriana, N. L., & Prastiwi, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam annual report. *Diponegoro journal of accounting*, 642-651
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Irmalasari, E. ., Gurendrawati, E. ., & Muliasari, I. . (2022). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 443–460. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.11>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4).
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*(12th ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Kurnia, P. and, A. (2024), "Board gender diversity and cyber security disclosure in the Indonesian banking industry: a two-tier governance context", *Corporate Governance*, Vol. 24 No. 7, pp. 1614-1637.
- Mazumder, M. M. M., & Hossain, D. M. (2023). Voluntary cybersecurity disclosure in the banking industry of Bangladesh: does board composition matter? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 13(2), 217–239. <https://doi.org/10.1108/JAEE-07-2021-0237>
- Neliana, T. (2018). Pengungkapan sukarela laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 79-98.
- Orazalin, N. (2020). Board gender diversity, corporate governance, and earnings management: Evidence from an emerging market. *Gender in Management*, 35(1), 37–60. <https://doi.org/10.1108/GM-03-2018-0027>
- Pernamasari, R. (2020). Determinants of Voluntary Disclosure: Based on Financial Ratios and Financial Distress. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(4), 130–141.
- Purnama, D. P., & Handayani, B. D. (2021). The effect of financial performance and corporate governance on sustainability report disclosure with company size as a moderation. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 138-162.



- Radu, C., & Smaili, N. (2022). Board Gender Diversity and Corporate Response to Cyber Risk: Evidence from Cybersecurity Related Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 177(2), 351–374. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04717-9>
- Rahmat, R. (2024). THE INFLUENCE OF GENDER DIVERSITY ON BOARD AND COMPANY DEBT POLICY ON CORPORATE PERFORMANCE. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 134–155. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.53597>
- Redaksi, (t.t). BSI Diserang Ransomware, Nasib Uang Nasabah Gimana? CNBC Indonesia. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230510174928-37-436279/bsi-diserang-ransomware-nasib-uang-nasabah-gimana>
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>
- Saleh, M. W. A., Zaid, M. A. A., Shurafa, R., Maigoshi, Z. S., Mansour, M., & Zaid, A. (2020). Does board gender enhance Palestinian firm performance? The moderating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance (Bingley)*, 21(4), 685–701. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2020-0325>
- Sari, L., Adam, M., Fuadah, L. L., & Yusnaini, . (2024). Determinant Factors of Cyber Security Disclosure: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i14.16113>
- SecurityScorecard, National Association of Corporate Directors, Cyber Threat Alliance, IHS Markit, & Diligent. (2021). The state of cyber-risk disclosures of public companies. March, 1–10. <https://resources.securityscorecard.com/all/the-state-of-cyber-riskdisclosures?xs=246878#page=1>
- Simatupang, A., & Siska, E. (2021). Penerbit: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII-Ambon KAMBOTI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strategi Financial Technology dalam Mengatasi Lonjakan Transaksi Lender pada Masa Pandemi Covid 19. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Siska, E. (2022). Financial Technology (FinTech) and Its Impact on Financial Performance of Islamic Banking. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(3). <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v2i3.338>
- Sirait, K. N., & Fuad, F. (2024). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1).
- Subarno, M. H., & Setiawati, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan tahunan. In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1).
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Zachary, E., & Fuad, F. (2025). Pengaruh Ukuran Dewan, Dewan Komisaris Independen, dan Keragaman Gender di Dewan Terhadap Pengungkapan ESG (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(1).
- Zaid, M. A. A., Wang, M., & Abuhijleh, S. T. F. (2019). The effect of corporate governance practices on corporate social responsibility disclosure: Evidence from Palestine. *Journal of Global Responsibility*, 10(2), 134–160.

Zarkasyi, W. (2018). *Good Corporate Governance (Edisi 3)*. Bandung: Alfabeta.